

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Fokus Peningkatan Kualitas

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Radar Bandung/Hal. 7

Edisi : Jumat, 13 April 2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT

1 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,

2 Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan,

FOKUS PENINGKATAN KUALITAS

BANDUNG - Ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan kualitas komponen pembangunan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangu-

nan (Musrenbang) Jawa Barat di Hotel Intercontinental, Jl. Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten Bandung, Kamis (12/4/18). Musrenbang ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

► FokusBaca Hal 7

3 Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK),

4 Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi,

5 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar,

6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang,

7 Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk meningkatkan Daya Saing Jawa Barat,

8 Penguatan Reformasi Birokrasi.

GRAFIS: M. FAZRURROCHMAN

Fokus Peningkatan Kualitas

■ Sambungan dari Hal 8

"Prioritas kita masih pendidikan, kesehatan, masih infrastruktur, tentu fokusnya lebih kita tajamkan pada kualitas SDM, kualitas infrastruktur. Dan pada kemandirian perekonomian, baik itu pangan ataupun non-pangan," ujar Aher.

Aher menekankan, peningkatan kualitas ini penting untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan penguatan devisa negara. Menurutnya, guncangan perekonomian tidak akan terjadi manakala pertumbuhan ekonomi nasional tinggi dan

kemandirian ekonomi nasional juga tinggi.

"Kita ini boros Dollar. Dollar yang kita punya dikirim ke luar negeri untuk transaksi ekspor-impor kita. Tentu penghematan Dollar, penghematan Devisa kita akan bisa kita lakukan manakala kita semakin memperkecil impor dan memperbesar ekspor kita," papar Aher.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI diwakili Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungki Sumadi berharap RKPD 2019 Jawa Barat bisa menjadi pedoman untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

evaluasi, dan pengendalian serta pertanggungjawaban pembangunan daerah.

Hal ini juga sebagai langkah harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi usulan program dan kegiatan dari seluruh stakeholder pembangunan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan di Jawa Barat.

Selain itu, RKPD ini diharapkan menjadi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, proses, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan,

dan berkelanjutan, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Pembangunan Jawa Barat 2017

Perekonomian Jawa Barat yang ditunjukkan dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%, yang berada diatas rata-rata Nasional sebesar 5,07%. Pada 2017, Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Nasional dengan pangsa yang mencapai 12,92%, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (17,43%) dan Jawa Timur (14,61%). Besarnya kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian Nasional disebabkan karena

kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Barat (ADHB) sebesar 21,13% terhadap industri pengolahan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang cukup baik, ditandai juga oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka PDRB per kapita (ADHB) sebesar Rp 37,18 juta pada 2017 sedangkan pada 2016 sebesar Rp 34,88 juta. Capaian tersebut berdampak juga terhadap menurunnya angka kemiskinan dari 8,77% pada 2016 menjadi 7,83% pada 2017.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya Investasi Pembentukan

Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp 449,34 Triliun lebih. Peningkatan investasi berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,84 juta pada 2017 sedangkan 2016 sebesar 1,87 juta.

Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat dapat dilihat dari capaian pemerataan pembangunan yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai gini rasio sebesar 0,393 pada 2017 sedangkan pada 2016 sebesar 0,42. Provinsi Jawa Barat masuk kategori "Ketimpangan Sedang" karena berada pada kisaran 0,3-0,5.

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat lainnya dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,05 poin Tahun 2016 ditunjukkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,30 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,95 tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 72,44 tahun dan Indeks Daya Beli sebesar 70,24 poin.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan. (bbb/hms)